

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

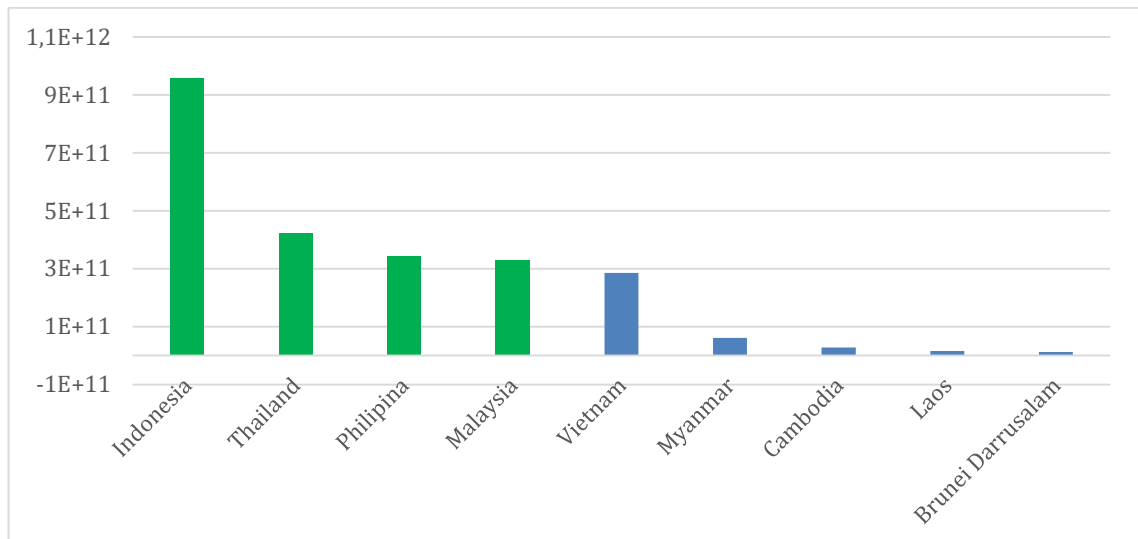
Dalam suatu negara, terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut umumnya dilakukan melalui perumusan kebijakan ekonomi yang tepat, seperti peningkatan investasi, pengembangan sektor industri dan perdagangan, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mendorong produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hasil dari implementasi berbagai kebijakan dan strategi ekonomi yang bertujuan mendorong peningkatan aktivitas dan kinerja perekonomian (Suhaidar & Anggita, 2023). Strategi pembangunan tersebut mencakup peningkatan peran perdagangan internasional, penguatan arus investasi asing langsung, serta pengendalian inflasi sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi. Teori neoklasik Solow memberi gambaran pertumbuhan ekonomi yaitu hasil dari proses akumulasi modal dan tenaga kerja yang didukung oleh peran teknologi sebagai faktor pendorong produktivitas (Budiati et al 2025).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan berbagai indikator, salah satunya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto mencerminkan jumlah keseluruhan pengeluaran suatu perekonomian untuk berbagai barang dan jasa yang diproduksi selama periode tertentu, sekaligus mencakup total pendapatan yang diperoleh dari barang dan jasa tersebut (Parianom et al., 2024). Oleh karena itu, PDB menjadi indikator makroekonomi yang penting dalam menganalisis keberhasilan kebijakan ekonomi dan pembangunan suatu negara.

Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara ASEAN menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang bervariasi meskipun berada dalam satu kerangka integrasi regional. Secara teori, integrasi ASEAN, seperti yang diwujudkan melalui

AEC, diharapkan dapat mempercepat konvergensi pertumbuhan melalui mekanisme perdagangan (Siahaan, 2023). Namun, realitas empiris menunjukkan adanya perbedaan tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan.



Sumber : World Bank, 2024

Gambar 1. Average Real GDP of Developing ASEAN Countries (2011–2024)

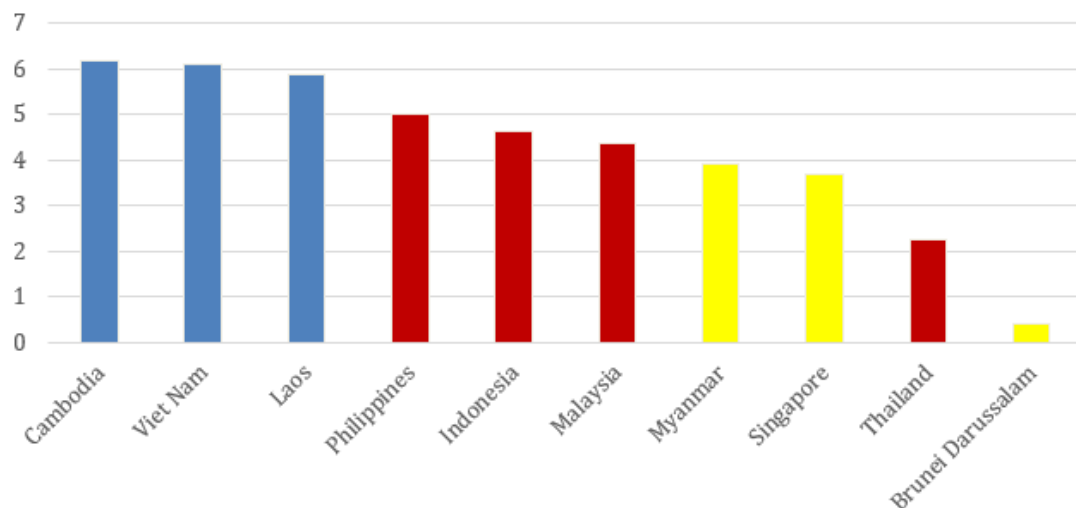
Dalam penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada kelompok 4 negara ASEAN, yang terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Penentuan sampel ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Berdasarkan data dari World Bank (2024), keempat negara ASEAN tersebut termasuk di dalamnya dengan posisi ekonomi yang relatif besar dengan PDB Rill yang lebih besar dibandingkan negara berkembang di ASEAN lainnya. Namun, tidak disertai dinamisme pertumbuhan yang memadai yang dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi keempat negara tersebut tidak lebih dari 5% selama 14 tahun terakhir. Meskipun secara statistik pertumbuhan ekonomi mereka berada di bawah Kamboja atau Viet Nam, kelompok ini memiliki kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar terhadap total output ekonomi regional.

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)



Sumber : World Bank, 2024

Gambar 2. Average Gross Domestic Product Growth ASEAN (2011-2024)

Dalam sepuluh tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi keempat negara ini berada di kisaran 3–5%, jauh di bawah potensi yang seharusnya dapat dicapai mengingat kondisi demografis dan sumber daya yang dimiliki. Indonesia tumbuh stagnan di sekitar 5% dan menghadapi tantangan deindustrialisasi prematur serta ketergantungan komoditas. Menurut Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini, hal ini tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) sektor manufaktur yang terus mengalami penurunan dan berada di bawah level 50 persen (Lavinda, 2024). Disisi lain, Filipina menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi namun sangat volatil dan tidak inklusif, dengan overkonsentrasi pada remitansi tenaga kerja luar negeri. Malaysia terjebak dalam middle income trap yang klasik, dengan brain drain yang parah dan ketergantungan pada komoditas siklikal. Thailand mencatat pertumbuhan paling rendah di antara keempatnya, diperparah oleh instabilitas politik kronis dan tekanan demografis akibat penuaan populasi yang cepat.

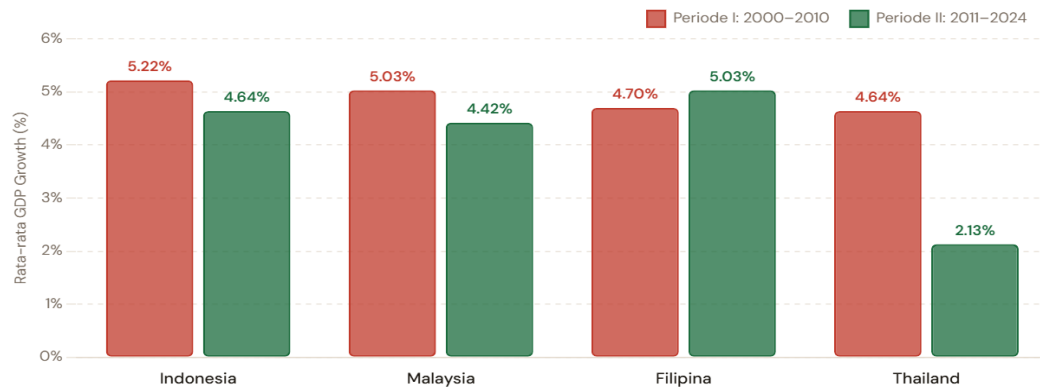
Oleh karena itu, pemilihan Filipina, Indonesia, Malaysia dan Thailand dianggap paling relevan untuk menggambarkan dinamika ekonomi yang kompetitif, stabil, dan memiliki keterkaitan yang kuat dalam rantai pasok global. Fokus pada kelompok ini diharapkan dapat memberikan hasil analisis yang lebih akurat dan dapat digeneralisasi untuk kebijakan ekonomi makro di kawasan yang telah maju secara struktural.

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)



Sumber : *World Bank, 2024*

Gambar 3. Rata-rata GDP Growth (%) per Periode di 4 Negara ASEAN

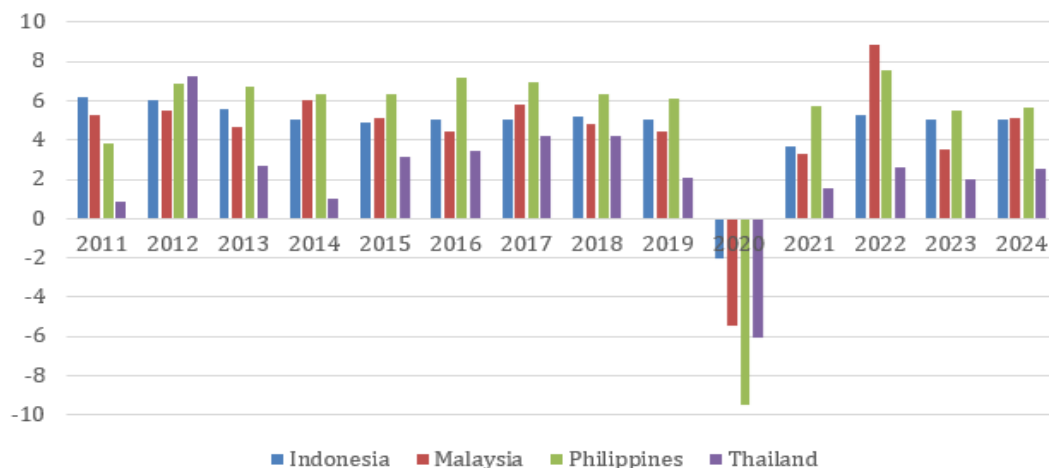
Secara data, dapat ditunjukkan bahwa rata-rata GDP growth keempat negara ASEAN menurun pada periode 2011–2024 dibandingkan 2000–2010. Hal ini justru memperkuat urgensi penelitian: meskipun periode pasca-2011 ditandai oleh berbagai kebijakan integrasi regional termasuk implementasi RCEP (2022), pertumbuhan ekonomi justru cenderung lebih rendah dan stagnan. Fenomena inilah yang menjadi research gap utama mengapa kebijakan perdagangan seperti RCEP tidak serta-merta mendorong akselerasi pertumbuhan? Tahun 2011 dipilih pula karena bersamaan dengan diumumkannya negosiasi RCEP di KTT ASEAN Bali, menjadikannya titik awal yang relevan secara kebijakan maupun data.

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)



Sumber : World Bank, 2024

Gambar 4. Gross Domestic Product Growth di 4 Negara ASEAN 2011-2024

Berdasarkan grafik, selama periode 2011–2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Filipina menunjukkan dinamika yang kontras namun sama-sama menyimpan tantangan struktural. Indonesia cenderung mengalami stagnasi pertumbuhan di kisaran 5% per tahun. Stabilitas ini mencerminkan kuatnya konsumsi domestik sebagai penopang utama ekonomi, tetapi sekaligus menunjukkan belum optimalnya transformasi struktural menuju sektor manufaktur dan industri bernilai tambah tinggi (Pitaloka & Budiningsih, 2025). Ketergantungan pada konsumsi membatasi percepatan pertumbuhan, sehingga penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan produktivitas jangka panjang belum optimal. Di sisi lain, Filipina kerap mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, bahkan melampaui 6% sebelum pandemi. Namun, struktur ekonominya sangat bergantung pada remitansi pekerja migran dan sektor jasa berbasis *business process outsourcing* (BPO). Filipina sebagai salah satu penerima remitansi terbesar di dunia bersama India, Meksiko, dan Tiongkok, (Gonzales, 2025). Sehingga pertumbuhannya relatif volatil dan rentan terhadap guncangan eksternal, sebagaimana terlihat saat krisis global dan pandemi COVID-19.

Sementara itu, Thailand dan Malaysia menghadapi persoalan yang berbeda namun sama-sama bersifat struktural. Thailand mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup konsisten dalam satu dekade terakhir, dengan angka yang sering berada di kisaran 2–3%. Kondisi ini dipengaruhi oleh penuaan penduduk yang terjadi sebelum negara tersebut mencapai tingkat pendapatan tinggi, serta

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

tingginya utang rumah tangga yang menekan daya beli dan konsumsi domestik. Proporsi penduduk di Thailand berusia 60 tahun ke atas diproyeksikan meningkat dari 13% pada tahun 2010 menjadi 33% pada tahun 2040 (Lorthanavanich et al., 2021). Akibatnya, dalam jangka panjang, dinamika ini dapat memperlambat laju GDP Growth suatu negara. Adapun Malaysia mencatat pertumbuhan yang relatif stabil di kisaran 4–5%, tetapi tingkat keterbukaan ekonominya yang tinggi membuatnya sangat bergantung pada ekspor komoditas dan produk elektronik. Teori Prebisch-Singer menjelaskan bahwa negara yang mengandalkan ekspor komoditas primer berisiko mengalami penurunan *terms of trade* (TOT) dalam jangka panjang, (Prebisch, 1950). Akibatnya, kinerja pertumbuhan Malaysia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global dan dinamika permintaan dari mitra dagang utama.

Pada tahun 2020, empat negara ASEAN mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Salah satunya yaitu Filipina yang mengalami penurunan sekitar 15% yang merupakan penurunan tertajam dibandingkan negara lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada saat pandemi Covid-19 Filipina menutup akses pasar keuangan sebagai upaya melindungi pelaku pasar dari risiko penularan COVID-19. Navarro et al.(2023) juga menjelaskan bahwa penutupan ini merupakan yang pertama terjadi di dunia sebagai respons terhadap penyebaran virus corona, sehingga berdampak signifikan terhadap aktivitas investasi, kepercayaan pelaku pasar, serta aliran modal, yang pada akhirnya memperdalam perlambatan ekonomi nasional Filipina.

Pada periode 2022–2023 terlihat adanya fenomena *boom and bust* dalam pertumbuhan ekonomi empat negara ASEAN. *Boom and bust* merupakan fitur endemik dari kapitalisme, di mana aktivitas ekonomi kerap mengalami pertumbuhan kuat yang diikuti oleh penurunan tajam (Baquer & Fuster, 2023). Lalu pada tahun 2022 menjadi fase pemulihan yang sangat kuat, di mana Malaysia mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,86 persen, diikuti Filipina sebesar 7,58 persen dan Indonesia sebesar 5,31 persen. Lonjakan ini didorong oleh pembukaan kembali aktivitas ekonomi pascapandemi, pemulihan konsumsi domestik, peningkatan ekspor, serta efek basis rendah (*base effect*) dari tahun sebelumnya.

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

Secara umum, 2022 mencerminkan momentum pemulihan yang agresif dan serentak di kawasan.

Namun pada 2023, pertumbuhan ekonomi 4 negara ASEAN ini melambat tajam setelah lonjakan 2022, mencerminkan normalisasi pascapemulihan dan tekanan eksternal global, sehingga menunjukkan bahwa kenaikan sebelumnya lebih bersifat siklikal daripada struktural serta belum sepenuhnya merefleksikan dampak langsung dari salah satu kebijakan perdagangan internasional di ASEAN, yaitu RCEP. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah blok perdagangan regional terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 30% PDB global, 27% total perdagangan dunia, serta masing-masing 29% dari arus investasi asing langsung dan populasi dunia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara seharusnya dapat didorong melalui kebijakan liberalisasi perdagangan yang bertujuan memperluas dan mempercepat aktivitas perekonomian (Desmintari et al., 2023). Dalam konteks integrasi ekonomi regional, liberalisasi perdagangan kemudian diwujudkan melalui perjanjian perdagangan internasional, salah satunya adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang diharapkan mampu memperkuat kerja sama ekonomi, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya terutama 4 negara di ASEAN tersebut.

Perjanjian perdagangan ini dapat membuka akses pasar yang lebih luas, mengurangi hambatan tarif, dan mempermudah arus investasi asing. Hal ini pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan sektor perdagangan, yang merupakan kontributor utama bagi GDP suatu negara. Menurut Aprita & Adhitya (2020), perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani dan meratifikasinya. Perjanjian perdagangan berperan dalam meningkatkan efisiensi perekonomian, memperluas ragam produk yang dihasilkan, serta mendorong pengembangan sektor-sektor industri strategis, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi secara agregat (Pandin, Sutphin, et al., 2025). Dalam konteks RCEP sebagai perjanjian perdagangan regional, tujuan tersebut diarahkan untuk memperkuat kinerja ekonomi negara-negara anggotanya. Secara

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

teoretis, liberalisasi perdagangan melalui RCEP diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi anggotanya melalui peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, transfer teknologi, dan perluasan akses pasar.

Namun demikian, fakta empiris dalam tiga tahun pertama implementasi RCEP justru menunjukkan fenomena yang bertentangan dengan ekspektasi teoretis tersebut. Secara teori, kerangka perdagangan bebas seperti RCEP seharusnya mampu menjadi penyangga (buffer) pertumbuhan ekonomi setidaknya menahan laju perlambatan melalui perluasan akses pasar ekspor dan peningkatan arus investasi. Namun yang terjadi adalah sebaliknya yaitu pertumbuhan GDP keempat negara justru mengalami tren penurunan setelah RCEP diberlakukan. Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,31% pada 2022 yang kemudian terus melambat menjadi 5,05% pada 2023 dan 5,0% pada 2024. Malaysia bahkan mengalami penurunan drastis dari 8,70% pada 2022 menjadi hanya 3,60% pada 2023. Thailand yang pertumbuhannya sudah rendah sejak sebelum RCEP tetap stagnan di kisaran 1,9–2,5%, sementara Filipina juga menunjukkan tren serupa dengan perlambatan dari 7,60% pada 2022 menjadi 5,55% pada 2023.

Hal tersebut tidak sejalan dengan teori export-led growth, yang dimana menjelaskan bahwa perdagangan internasional dipandang sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar bagi produsen domestik, (Sumiyarti, 2015). Akses terhadap pasar global memungkinkan peningkatan skala produksi, efisiensi, dan penyerapan tenaga kerja, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, model Heckscher–Ohlin juga menjelaskan bahwa perdagangan internasional memungkinkan negara memanfaatkan faktor produksi yang melimpah serta langka dan mahal secara optimal melalui spesialisasi, (Bakara et al., 2024). Spesialisasi ini meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan output nasional. Dari perspektif teori pertumbuhan endogen, perdagangan internasional juga berperan sebagai saluran difusi teknologi dan pengetahuan, yang meningkatkan produktivitas dan menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori export-led growth, Heckscher-Ohlin, dan pertumbuhan endogen menekankan perdagangan internasional sebagai pendorong utama growth melalui ekspansi pasar, spesialisasi faktor, dan difusi teknologi (Salam, 2022).

Erina Putri Irwanti, 2026

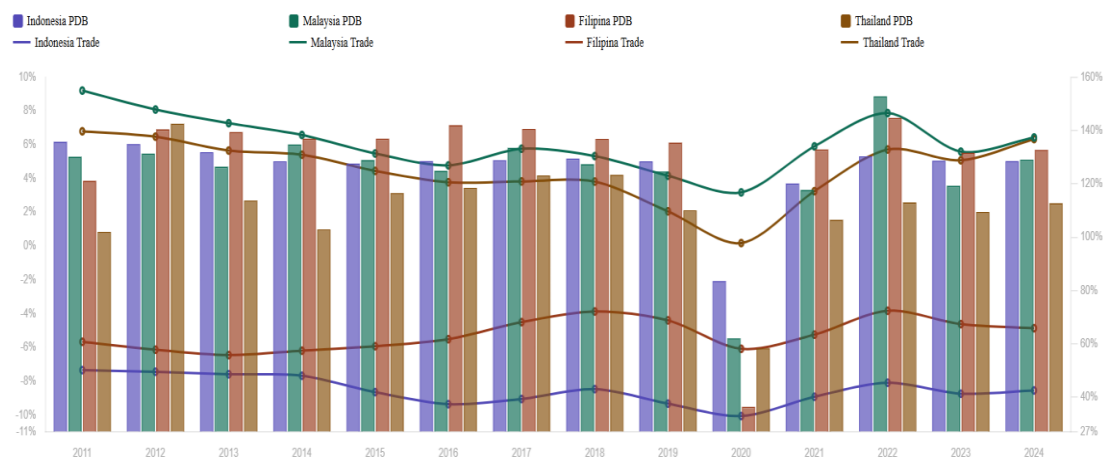
DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

Integrasi ekonomi regional dinilai berhasil ketika mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena pertumbuhan tersebut menjadi prasyarat bagi peningkatan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi jangka panjang (Baldwin & Venables, 2020). Oleh karena itu, analisis pertumbuhan ekonomi pada 4 negara ASEAN yang termasuk anggota RCEP menjadi krusial untuk memahami sejauh mana kebijakan perdagangan dan kerja sama regional mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi. Kajian ini juga relevan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan berdasarkan dari (Perserikatan Bangsa Bangsa Indonesia, 2023).

Dalam konteks ini, *trade openness* menjadi indikator empiris yang menggambarkan sejauh mana suatu negara terintegrasi dalam perdagangan global, umumnya diukur melalui rasio total ekspor dan impor terhadap PDB. Semakin tinggi tingkat *trade openness*, semakin besar pula eksposur suatu negara terhadap dinamika eksternal baik berupa peluang pertumbuhan melalui ekspansi ekspor maupun risiko transmisi guncangan global.



Sumber : World Bank, 2024

Gambar 5. Tingkat Trade Openness Terhadap Gross Domestic Product

Growth di 4 Negara ASEAN Tahun 2011-2024

Menurut Aulia et al. (2025), keterbukaan perdagangan internasional dipandang sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi karena mendorong

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

spesialisasi, efisiensi produksi, dan perluasan pasar, sebagaimana dijelaskan dalam teori pertumbuhan ekonomi oleh Adam Smith. Namun terdapat fenomena kontradiktif antara dinamika *trade openness* dan pertumbuhan ekonomi pada 4 negara ASEAN, khususnya Indonesia yang mengalami peningkatan rasio keterbukaan perdagangan dari 32,97% pada 2020 menjadi 45,46% pada 2022, yang disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari -2,07% menjadi 5,31%. Namun, pada periode 2023–2024, meskipun pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5,03–5,05%, rasio keterbukaan perdagangan justru menurun dari 45,46% menjadi 42,57%.

Terlihat juga perbedaan yang signifikan antara trade dan pertumbuhan PDB Malaysia pada periode 2011–2016, yang di mana trade mengalami penurunan yang cukup tajam, sementara PDB tetap relatif stabil. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian arah pergerakan antara kedua variabel tersebut. Hal ini dikarenakan Dari tahun 2011 hingga 2016, terjadi depresiasi nilai tukar di Malaysia setelah sebelumnya mengalami apresiasi pada periode 2009–2011 (Soh et al., 2022). Selain itu, perbedaan yang cukup mencolok juga kembali terlihat pada periode 2022–2023, ketika trade mengalami fluktuasi yang cukup besar, sedangkan PDB cenderung menunjukkan pergerakan yang stabil atau sedikit menurun. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hubungan antara trade dan pertumbuhan PDB tidak selalu berjalan searah, khususnya dalam jangka pendek.

Hal serupa juga terjadi di Filipina pada 2011, *trade openness* menurun dari 60,80 persen menjadi 57,84 persen, namun pertumbuhan ekonomi justru melonjak dari 3,86 persen menjadi 6,90 persen. Lonjakan PDB didorong oleh aliran remitansi dari pekerja migran (OFW) yang mencapai lebih dari US\$20 miliar, serta pertumbuhan sektor Business Process Outsourcing (BPO) sebesar 20% YoY, yang mampu menutupi penurunan ekspor elektronik akibat krisis Eropa 2011 (Mangindalat, 2024). Sementara itu, pada periode 2016–2018 ketika rasio perdagangan meningkat dari 61,78 persen menjadi 72,16 persen, pertumbuhan PDB justru melambat dari 7,15 persen menjadi 6,34 persen. terjadi suatu pola yang serupa juga terlihat di Thailand, di mana pada periode 2011–2012 *trade openness* menurun dari 139,68 menjadi 137,67, tetapi pertumbuhan ekonomi melonjak tajam dari 0,84% menjadi 7,24%.

Erina Putri Irwanti, 2026

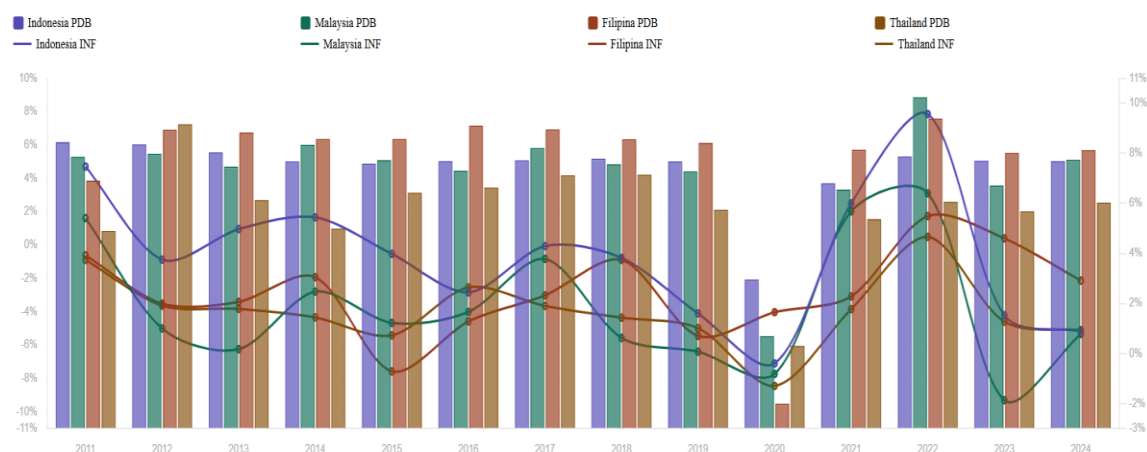
DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat keterbukaan perdagangan tidak selalu diikuti oleh perubahan pertumbuhan ekonomi yang searah. Kondisi ini tidak sepenuhnya sejalan dengan hubungan kausal antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan dalam hipotesis *Export-Led Growth* (ELG). Hipotesis ini menegaskan bahwa strategi perdagangan yang berorientasi ke pasar internasional dan bertumpu pada ekspor dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Petchko, 2020). Selain itu, temuan ini juga tidak sepenuhnya konsisten dengan pandangan David Ricardo dalam teori keunggulan komparatif, yang dimana menyatakan jika keterlibatan dalam suatu perdagangan internasional akan meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hubungan antara *trade openness* dan pertumbuhan ekonomi menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut secara empiris.

Selain faktor dari sisi perdagangan internasional, inflasi juga termasuk kedalam salah satu faktor dari makro ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Fischer (1993) tingkat inflasi yang cukup tinggi bisa memiliki dampak negatif terhadap keberlangsungan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui tiga mekanisme utama, yaitu: (1) menimbulkan suatu ketidakpastian dalam ekonomi yang dapat mengakibatkan penghambatan investasi jangka panjang, (2) mendistorsi sinyal harga relatif sehingga menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, dan (3) menggerus daya beli riil masyarakat yang berujung pada penurunan konsumsi dan tabungan. Inflasi yang tidak terkendali, terutama dalam bentuk hiperinflasi, dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap mata uang domestik, menurunkan daya beli, serta menghambat laju pertumbuhan ekonomi (Su & Soon, 2024). Kondisi ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.



Sumber : World Bank, 2024

Gambar 6. Tingkat Inflasi Terhadap *Gross Domestic Product Growth* di 4 Negara ASEAN 2011-2024

Berdasarkan grafik melihat pada Indonesia, periode 2012–2014 menunjukkan inflasi yang meningkat dari 3,75 persen menjadi 5,44 persen, sementara pertumbuhan PDB justru melambat dari 6,03 persen menjadi 5,01 persen. Pola serupa terjadi pada 2018–2020 ketika inflasi turun dari 3,82 persen menjadi -0,40 persen, tetapi pertumbuhan ekonomi juga merosot tajam dari 5,17 persen menjadi -2,07 persen. Bahkan pada 2021–2022, inflasi naik berada di atas angka 5% tertinggi sepanjang 10 tahun dan pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi juga meningkat dari 3,70 persen menjadi 5,31 persen. Kenaikan inflasi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga pangan global yang menyebabkan inflasi makanan dan minuman sekitar 5–8% pada 2022 (Maulidya et al., 2024). Fenomena pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang meningkat secara bersamaan ini bertentangan dengan pandangan Keynes, yang di mana peningkatan aktivitas ekonomi seharusnya diikuti oleh inflasi yang lebih terkendali (Sugiyanto et al., 2024).

Kondisi ini dapat melihat tekanan inflasi dapat berasal dari sisi penawaran (*cost-push inflation*), yang dipicu oleh peningkatan biaya produksi misalnya pada kenaikan harga pada bahan baku, upah yang diberikan untuk tenaga kerja, tarif impor, depresiasi nilai tukar, serta inflasi yang ditransmisikan dari luar negeri (*imported inflation*), sehingga tidak selalu disebabkan oleh lonjakan permintaan agregat (Prameswati et al., 2025). Disisi lain juga data menunjukkan di Malaysia,

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

inflasi menurun dari 3,78 persen pada 2017 menjadi 0,07 persen pada 2019 hal ini dikarenakan Pemerintah Malaysia menetapkan harga siling (price ceiling) untuk bahan bakar seperti RON95, sehingga harga bensin dan diesel domestik tidak naik terlalu tinggi meskipun harga minyak dunia fluktuatif (Putrajaya, 2019). Ini secara langsung menahan inflasi komponen energi dan transportasi, tetapi pertumbuhan ekonomi ikut melambat dari 5,81 persen menjadi 4,41 persen.

Perkembangan inflasi dan pertumbuhan PDB Filipina selama periode 2011–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pertumbuhan PDB relatif stabil di kisaran 5–7% pada periode 2011–2019, sebelum mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020, kemudian pulih signifikan pada 2021 dan kembali stabil pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, inflasi menunjukkan pergerakan yang lebih volatil, dengan beberapa kali mengalami penurunan tajam hingga negatif (seperti sekitar 2015 dan 2020), serta lonjakan yang cukup tinggi terutama pada 2018 dan periode 2022–2023. Secara umum, grafik ini menggambarkan bahwa inflasi memiliki tingkat fluktuasi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB, sementara PDB cenderung bergerak lebih stabil kecuali pada periode krisis.

Sementara itu, perkembangan inflasi dan pertumbuhan PDB Thailand selama periode 2011–2024 menunjukkan pola yang cukup berfluktuasi. Pertumbuhan PDB cenderung berada pada tingkat rendah dan tidak stabil, dengan beberapa periode mengalami perlambatan bahkan kontraksi, terutama pada tahun 2020 yang menunjukkan penurunan tajam ke arah negatif. Setelah itu, PDB mulai pulih pada 2021 dan mengalami peningkatan secara bertahap hingga 2024, meskipun masih berada pada level yang relatif moderat. Sementara itu, inflasi menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi, dengan tren menurun pada periode awal, kemudian mengalami fluktuasi, termasuk penurunan tajam pada 2020 hingga bernilai negatif, diikuti lonjakan signifikan pada 2022, dan kembali menurun pada periode setelahnya.

Kontradiksi ini menegaskan bahwa hubungan inflasi dan pertumbuhan di negara-negara tersebut tidak bersifat linier sebagaimana dijelaskan teori sederhana, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor permintaan, shock eksternal, kebijakan fiskal-moneter, serta struktur ekonomi domestik masing-masing negara. Penurunan inflasi pada periode ini disebabkan oleh lemahnya permintaan agregat,

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

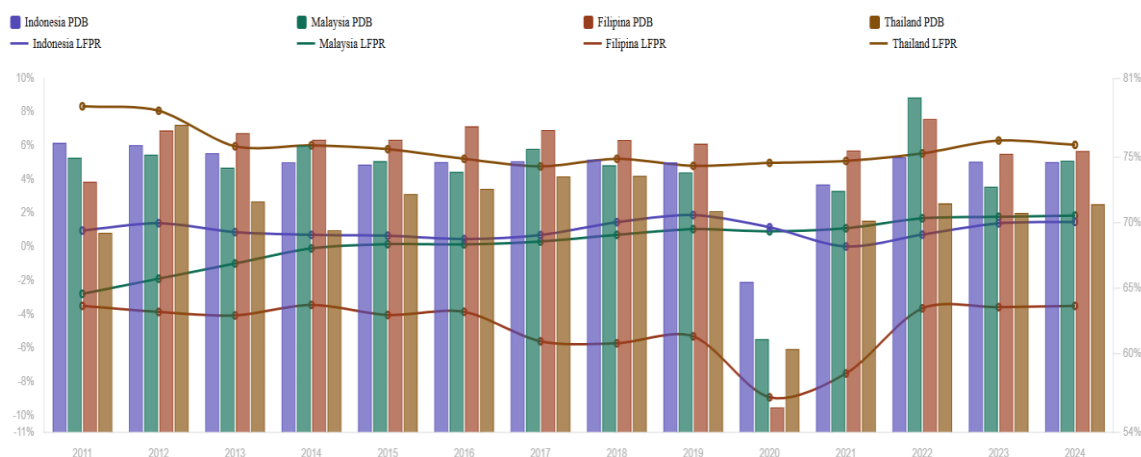
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

penurunan mobilitas masyarakat, serta penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi. Kondisi ini sejalan dengan teori permintaan agregat Keynesian yang menyatakan bahwa pelemahan aktivitas ekonomi akan menekan tekanan harga (Manik et al., 2024).

Temuan kontradiktif antara inflasi dan pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa dinamika output tidak semata-mata ditentukan oleh stabilitas harga, tetapi juga oleh faktor fundamental lain dalam perekonomian, salah satunya adalah partisipasi tenaga kerja. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik maupun neoklasik, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama yang menentukan kapasitas output suatu negara. Dalam model Robert Solow (Solow Growth Model), pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi, (Boediono, 2021). Peningkatan jumlah tenaga kerja yang produktif dapat direpresentasikan melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) akan meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan output jangka panjang, *ceteris paribus*.

Selain itu, menurut Smith dalam model pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja merupakan salah satu dari dua faktor produksi utama bersama modal fisik yang secara langsung menentukan kapasitas output suatu perekonomian, sehingga peningkatan LFPR yang mencerminkan bertambahnya jumlah tenaga kerja aktif akan secara proporsional meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ketika inflasi dan pertumbuhan menunjukkan hubungan yang tidak konsisten, LFPR menjadi relevan untuk dianalisis sebagai salah satu determinan struktural pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan partisipasi tenaga kerja dapat memperkuat sisi penawaran (*supply side*) dan memperluas kapasitas output nasional secara berkelanjutan (Shirazi & Manap, 2005).



Sumber : World Bank, 2024

Gambar 7. Labour Force Participate Rate Terhadap Gross Domestic Product

Growth di 4 Negara ASEAN 2011-2024

Selama 2011–2019, pertumbuhan PDB Indonesia menunjukkan tren melambat dari 6,17% di tahun 2011 menjadi 5,02% pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 55% terhadap PDB mengalami perlambatan dari 5,8% menjadi 5%, dipengaruhi oleh inflasi yang berfluktuasi juga di kisaran 3–6% serta stagnasi daya beli kelas menengah, (Yusuf, 2021). Meskipun LFPR relatif stabil dan cenderung meningkat dari 69,38% pada 2011 menjadi 70,57% di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan akselerasi signifikan dan cenderung “tertahan” di kisaran 5%. Pada 2020, PDB berkontraksi -2,07% akibat pandemi, sementara LFPR hanya turun tipis menjadi 69,64%. Tahun 2021 pertumbuhan rebound ke 3,7% dan kembali stabil di atas 5% pada 2022–2024 berada di sekitar 5,03–5,31%, seiring LFPR yang kembali naik ke 70,05% pada 2024. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2021) Konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 54% PDB mendorong pemulihan 4,2% pada 2021 berkat stimulus fiskal Rp1.000 triliun dan lonjakan ekspor komoditas 46%, sementara LFPR yang naik bertahap selama normalisasi mencerminkan ketahanan struktural Indonesia dibanding negara berbasis manufaktur. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan atau stabilitas LFPR di Indonesia tidak selalu diikuti

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

lonjakan pertumbuhan ekonomi. Meskipun partisipasi tenaga kerja berada di kisaran tinggi sekitar 69–70%, pertumbuhan tetap stagnan di 5%.

Sementara itu di Malaysia, pada periode 2011 hingga 2014, keduanya bergerak selaras di mana pertumbuhan PDB yang kuat (di atas 5%) mendorong kenaikan partisipasi angkatan kerja secara linear, namun mulai tahun 2015 hingga 2019, PDB mulai mengalami fluktuasi moderat sementara LFPR terus menanjak konsisten mencerminkan perubahan struktural pasar tenaga kerja. Terlihat pada tahun 2018, LFPR malaysia mengalami kenaikan yang tidak searah dengan penurunan PDB. Kenaikan tersebut karena pemerintah mendorong kebijakan ramah perempuan, seperti perpanjangan cuti melahirkan dan kuota minimal 30% perempuan di posisi direksi. Selain itu, insentif pajak bagi perempuan yang kembali bekerja setelah jeda karier juga meningkatkan partisipasi mereka dalam angkatan kerja (Imfblog, 2018). Titik kontradiksi paling ekstrem terjadi pada tahun 2020, ketika PDB anjlok tajam ke angka negatif 5,6% akibat pandemi, namun LFPR justru menunjukkan ketahanan (*resilience*) dengan hanya mengalami penurunan sangat tipis dan tidak ikut terjun bebas, yang disusul oleh suatu fenomena lagi pada tahun 2021 dan 2022 di mana terjadi lonjakan PDB yang sangat tinggi (mencapai lebih dari 8% di 2022) tanpa diikuti lonjakan LFPR yang setara karena partisipasi kerja tetap tumbuh pada tren stabilnya.

Selanjutnya, dalam periode 2011–2024, berdasarkan Philippine Statistics Authority (PSA) dan World Bank (2024), tingkat partisipasi angkatan kerja (LFPR) Filipina pada 2022 tercatat sebesar 63,46%, lebih rendah dibandingkan rata-rata ASEAN yang sekitar 68%, terutama karena dominasi sektor informal yang menyerap sekitar 40% tenaga kerja. Meskipun demikian, pertumbuhan PDB mencapai 7,58% yang didorong oleh pemulihan konsumsi rumah tangga sebesar 7,7% pasca-pandemi, serta dukungan remitansi pekerja migran (OFW) yang mencapai sekitar US\$34 miliar atau setara 9,2% terhadap PDB. Fenomena ini menegaskan adanya ketidakselarasan empiris antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, Thailand memperlihatkan ketidaksesuaian yang cukup terlihat antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2011, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Thailand mencapai 78,86%,

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

namun pertumbuhan PDB hanya sebesar 0,84%. Meskipun sempat meningkat tajam menjadi 7,24% pada 2012, pertumbuhan kembali melemah ke 2,69% pada 2013 dan turun lagi menjadi 0,98% pada 2014, sementara LFPR tetap berada di atas 75%. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prediksi teoritis, karena Tingginya TPAK menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang terlibat dalam aktivitas produksi, sehingga berpotensi meningkatkan output nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Simbolon et al., 2026). Hal tersebut tidak sejalan dalam pandangan klasik Smith, tenaga kerja dianggap sebagai penggerak utama pertumbuhan yaitu jika jumlah tenaga kerja (LFPR) meningkat, maka *output* ekonomi (PDB) seharusnya ikut terkerek naik secara proporsional melalui pembagian kerja (*division of labour*).

Berdasarkan data di atas, kebijakan RCEP, *trade openness*, *inflasi* yang rendah dan *labor force participation rate* (LFPR) secara teoritis seharusnya dapat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun pada kenyataannya, jika dilihat berdasarkan data pada 4 negara di ASEAN tersebut justru menunjukkan tren pertumbuhan PDB yang melambat dan cenderung stagnan dalam satu dekade terakhir, bahkan di tengah diberlakukannya kebijakan liberalisasi perdagangan seperti RCEP. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana variabel-variabel tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat adanya kesenjangan yang cukup nyata antara apa yang diprediksi teori dengan apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh kebijakan RCEP, *trade openness*, *inflasi*, dan LFPR terhadap pertumbuhan PDB di 4 negara ASEAN, serta memberikan bukti yang lebih kontekstual terhadap dinamika ekonomi kawasan tersebut.

Sebagai blok perdagangan terbesar di dunia yang mencakup 30% PDB global, keberhasilan atau kegagalan RCEP dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada arah kebijakan perdagangan kawasan dalam jangka panjang. Tanpa evaluasi empiris yang memadai, pembuat kebijakan tidak memiliki landasan berbasis bukti yang cukup untuk mengoptimalkan manfaat RCEP bagi perekonomian nasional masing-masing negara anggota (Fukunari Kimura, 2022). Keempat negara ASEAN tersebut juga dikenal dengan negara ekonomi terbuka yang

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

sangat bergantung pada kinerja perdagangan internasional dalam mendorong pertumbuhan nasionalnya, maka keterbukaan perdagangan masih efektif sebagai mesin pertumbuhan menjadi krusial bagi perumusan kebijakan ekonomi (Seti et al., 2025). Selain itu, Bagi keempat negara ASEAN yang sedang dalam proses transformasi struktural menuju ekonomi berpendapatan tinggi, ketidakmampuan mengendalikan inflasi dapat mengancam kesinambungan pertumbuhan dan memperparah risiko *middle income trap* yang sudah mengintai kawasan ini. Selain itu, dalam konteks implementasi RCEP yang membuka arus perdagangan lebih luas, tekanan inflasi dari sisi impor (*imported inflation*) berpotensi meningkat dan memengaruhi stabilitas harga domestik secara berbeda di tiap negara (Nurhayati, 2025). Lalu dalam konteks LFPR, keempat negara ASEAN saat ini berada dalam fase demografis yang berbeda-beda namun Indonesia dan Filipina tengah berada di puncak bonus demografi yang jika tidak dimanfaatkan secara optimal akan menjadi beban ekonomi di masa mendatang, sementara Thailand dan Malaysia sudah mulai menghadapi tekanan penuaan populasi yang memperlambat pertumbuhan tenaga kerja aktif (Mohd et al., 2021).

Terdapat penelitian oleh Dhora dan Abbas (2025) yang menganalisis pertumbuhan ekonomi di ASEAN-6 periode 2014–2023 menggunakan regresi data panel, dengan hasil bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif tidak signifikan, investasi asing negatif tidak signifikan, dan produktivitas tenaga kerja negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, variabel tenaga kerja yang digunakan adalah produktivitas tenaga kerja, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi, sehingga penelitian ini menggunakan Labor Force Participation Rate (LFPR) sebagai indikator yang lebih representatif. Kedua, penelitian tersebut belum mempertimbangkan peran kebijakan integrasi perdagangan regional seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mulai berlaku pada 2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh trade openness terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan peran LFPR serta dampak awal implementasi RCEP di 4 Negara ASEAN.

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

Keterbatasan serupa juga ditemukan dalam penelitian Kristanti dan Fitriani (2025) yang mengkaji potensi RCEP terhadap peningkatan GDP nominal dan integrasi rantai nilai regional di kawasan ASEAN. Studi ini menekankan manfaat RCEP dari sisi perdagangan dan daya saing, namun bersifat deskriptif dan proyektif, sehingga belum menguji secara empiris pengaruh simultan RCEP, perdagangan internasional, inflasi dan LFPR terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dampak awal implementasi RCEP melalui pendekatan empiris menggunakan data hingga tahun 2024, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai bagaimana integrasi perdagangan melalui RCEP memengaruhi dinamika ekonomi negara-negara ASEAN. Selain itu, penelitian ini belum menggunakan pendekatan ekonometrika berbasis data panel antarnegara, sehingga belum mampu menangkap perbedaan dampak RCEP di masing-masing 4 negara ASEAN.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan melakukan analisis empiris lintas 4 negara ASEAN melalui pengintegrasian variabel perdagangan internasional, inflasi dan LFPR pada masing-masing negara, serta memasukkan kebijakan perjanjian perdagangan internasional RCEP sebagai kerangka institusional dalam model pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini diharapkan mampu menangkap heterogenitas dan dinamika pengaruh integrasi perdagangan regional terhadap pertumbuhan ekonomi yang belum terakomodasi secara memadai dalam penelitian terdahulu, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan pertumbuhan ekonomi dalam era integrasi ekonomi regional terbaru.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dinamika pertumbuhan ekonomi di 4 Negara ASEAN yang menunjukkan pola yang beragam serta adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dengan kinerja perdagangan internasional, inflasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Early Impact RCEP Agreement* terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN ?

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

2. Bagaimana pengaruh *Trade Openness* terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara Negara ASEAN?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN?
4. Bagaimana pengaruh LFPR terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dampak awal (early impact) dari penerapan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) Agreement terhadap pertumbuhan ekonomi di empat negara ASEAN.
2. Menganalisis pengaruh *trade openness* terhadap pertumbuhan ekonomi di empat negara ASEAN.
3. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di empat negara ASEAN.
4. Menganalisis pengaruh *Labour Force Participation Rate* (LFPR) terhadap pertumbuhan ekonomi di empat negara ASEAN.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara :

a) Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi makro dan ekonomi internasional, khususnya terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi asing langsung, dan keterbukaan perdagangan dalam konteks integrasi ekonomi regional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur empiris dengan menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel makroekonomi tersebut tidak selalu bersifat linier dan konsisten. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori dan model empiris yang lebih kontekstual terhadap dinamika ekonomi di 4 Negara ASEAN.

Erina Putri Irwanti, 2026

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI 4 NEGARA ASEAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah empat negara ASEAN dalam pengambilan kebijakan atau penelitian lebih lanjut untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional. Temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam memahami bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan peningkatan inflasi, investasi asing, maupun keterbukaan perdagangan, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi yang optimal untuk memaksimalkan manfaat RCEP terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai referensi ilmiah dan sumber pembandingan untuk para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan integrasi ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi, dan variabel makroekonomi. Penelitian ini juga dapat membuka peluang penelitian lanjutan dengan pendekatan metodologi yang berbeda, variabel tambahan, maupun periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga mampu memperluas diskursus akademik di ranah ekonomi pembangunan dan ekonomi internasional.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai dampak kebijakan kerja sama ekonomi regional seperti RCEP terhadap kondisi perekonomian secara umum. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perdagangan internasional, masyarakat dapat memiliki perspektif yang lebih kritis terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan stabilitas ekonomi.